

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pasar Rakyat atau yang biasa disebut dengan pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Pasal 1 ayat 5 merupakan tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan atau badan usaha milik daerah, dapat berupa toko atau kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta UMK-M dengan proses jual beli barang melalui tawar-menawar.

Peran pasar tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat sebagai penunjang sektor perekonomian Indonesia. Pasar rakyat menjadi penggerak perekonomian yang sangat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui jual beli barang lokal. Pasar rakyat menyediakan berbagai barang lokal yang dijual oleh pedagang lokal pula, seperti hasil pertanian, perkebunan, dan produk dari pengrajin lokal.

Keberadaan pasar rakyat menandakan bahwa masyarakat di Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai sosial. Transaksi yang dilakukan dalam proses jual beli di pasar rakyat membutuhkan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial yang baik. Selain itu, pasar rakyat merupakan sektor informal yang mampu

menyerap banyak tenaga kerja. Pasar rakyat membuka kesempatan bagi masyarakat untuk dapat mencari nafkah dengan menjadi pedagang yang berjualan di pasar. Namun, pandangan masyarakat terhadap pasar rakyat adalah pasar yang becek, kotor, bau, kadang-kadang sampah berserakan atau sampai menggunung tumpukan-tumpukan sampahnya sehingga masyarakat enggan berkunjung ke pasar rakyat. Sejalan dengan pendapat Rachmat (2018) bahwa pasar-pasar tradisional di Indonesia saat ini cenderung tidak layak sebagai tempat untuk bertransaksi jual beli karena kotor, kumuh, serta terbatasnya dukungan sarana dan prasarana pasar yang memadai. Berbeda dengan pasar modern yang lebih tertata rapi dan memiliki sarana yang lebih lengkap sehingga dapat membuat konsumen lebih nyaman untuk berbelanja di pasar modern dibandingkan dengan berbelanja di pasar tradisional.

Keberadaan pasar rakyat perlu dipertahankan karena memiliki peran yang sangat penting terkait kontribusinya dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kapasitasnya untuk menyerap pedagang melalui retribusi pasar yang dapat mendukung proses pembiayaan pembangunan daerah. Namun, Kabupaten Semarang belum mampu merealisasikan retribusi daerahnya dengan baik.

Tabel 1. 1 Realisasi Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 – 2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2020	43,57 M	30,45 M	69,89%
2021	47,61 M	27,70 M	58,19%
2022	49,74 M	38,30 M	77,01%

Sumber: Telah diolah kembali oleh peneliti 2023, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 retribusi daerah Kabupaten Semarang pada tahun 2020-2022 belum dapat terealisasi dengan optimal. Pada tahun 2020, retribusi daerah hanya terealisasi sebesar 69,89%, yaitu sejumlah 30,45 M dari target yang ditentukan sejumlah 43,57 M. Persentase tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 58,19%, yaitu sejumlah 27,70 M dari target yang ditentukan sejumlah 47,61 M. Meskipun persentase realisasi retribusi daerah mengalami kenaikan pada tahun 2022, tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 77,01% dengan realisasi sejumlah 38,30 M dari target yang ditentukan sejumlah 49,74 M. Pasar rakyat pun berkontribusi dalam retribusi daerah ini sehingga pasar rakyat di Kabupaten Semarang perlu dikelola dengan lebih baik untuk menunjang penerimaan PAD, khususnya pada retribusi daerah.

Apabila peran pasar rakyat dapat dikelola dengan baik, maka keberadaan pasar rakyat memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pasar rakyat dapat menjadi lapangan pekerjaan yang membuka peluang bagi para pedagang dan tenaga angkut untuk mendapatkan penghasilan. Pasar rakyat juga menjadi tempat yang potensial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersedia di pasar rakyat. Sandang, papan, dan pangan pun diperjualbelikan di pasar rakyat. Jumlah penduduk yang lebih banyak tentu akan membutuhkan kecukupan sandang, papan, dan pangan yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Semarang pada tahun 2022 mencapai 1,09%. Angka tersebut berada di atas laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah, yaitu sebesar 0,5%. Hal ini menandakan

bahwa pertumbuhan penduduk di Kabupaten Semarang meningkat dengan cepat sehingga kebutuhan masyarakat Kabupaten Semarang juga meningkat dengan cepat. Adapun persebaran penduduk di Kabupaten Semarang pada setiap Kecamatannya sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Jumlah Penduduk Kabupaten Semarang

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase
1	Getasan	53.412	5,009%
2	Tengaran	73.111	6,856%
3	Susukan	51.488	4,825%
4	Kaliwungu	31.347	2,939%
5	Suruh	74.125	6,952%
6	Pabelan	45.643	4,281%
7	Tuntang	69.312	6,500%
8	Banyubiru	45.429	4,260%
9	Jambu	41.758	3,916%
10	Sumowono	35.357	3,316%
11	Ambarawa	63.486	5,954%
12	Bandungan	60.029	5,629%
13	Bawen	59.940	5,621%
14	Bringin	48.557	4,554%
15	Bancak	25.147	2,384%
16	Pringapus	56.024	5,254%
17	Bergas	71.402	6,696%
18	Ungaran Barat	82.201	7,709%
19	Ungaran Timur	78.544	7,365%
Jumlah		106.6312	100%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 Kecamatan Ungaran Barat memiliki populasi penduduk terbanyak di Kabupaten Semarang, yaitu sejumlah 82.201 atau sebesar 7,709% dari total populasi penduduk di Kabupaten Semarang sehingga membutuhkan kecukupan pangan, papan, dan sandang yang lebih banyak dibandingkan dengan delapan belas kecamatan lainnya. Pasar Rakyat Babadan

memiliki peranan penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan perlu dilaksanakan dengan baik agar perannya dapat terlaksana dengan optimal.

Dalam pembinaan pasar rakyat, dibutuhkan manajemen tata kelola pasar rakyat yang baik dan terintegritas. Hal tersebut diperlukan untuk memperoleh pasar rakyat yang lebih profesional dan mampu memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun masyarakat sebagai pengunjung. Oleh karena itu, ditetapkanlah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Kabupaten Semarang pun telah menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan agar dapat menata dan membina keberadaan dan keberlangsungan hidup Pasar Rakyat.

Proses kebijakan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilannya dalam mencapai tujuan melalui tahap implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi tahap kebijakan yang tidak kalah penting dengan tahap pembuatan kebijakan. Apabila suatu kebijakan tidak dapat terlaksanakan, maka kebijakan tersebut hanya menjadi suatu rencana yang tersimpan dalam arsip. Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Pramono, 2020) menyatakan bahwa fokus perhatian pelaksanaan kebijakan adalah menganalisis fenomena-fenomena terjadi setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi kebijakan juga fokus pada kegiatan dan

kejadian yang muncul setelah ditetapkannya kebijakan sebagai pedoman bernegara, yang mencakup usaha untuk melaksanakannya dan menciptakan hasil sebagai dampak nyata bagi masyarakat. Suatu kebijakan harus dilaksanakan agar dapat memberikan dampak dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan dalam proses kebijakan publik adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa untuk mencapai hasil sesuai dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam kebijakan tersebut. Secara konseptual implementasi kebijakan merupakan proses pengumpulan sumber daya yang diikuti dengan penetapan langkah-langkah tertentu untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut.

Menurut Nugroho (2021) untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif, maka terdapat beberapa indikator yang perlu diperhatikan, yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat proses, tepat lingkungan, dan tepat target. Namun, indikator-indikator implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan belum berjalan dengan optimal. Interaksi antara pelaksana dengan perumus kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang belum berjalan dengan baik. Hal ini disampaikan oleh koordinator pengelola Pasar Rakyat Babadan dalam wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

“Dari pihak DPRD Komisi B kalau ada keluhan yang kami sampaikan tidak segera mendapatkan tindakan dan ketika menetapkan target retribusi itu tidak berdasarkan pada potensi yang

ada jadi ya sulit untuk direalisasikan.” (Wawancara pada hari Rabu 24 Mei 2023)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara pengelola pasar dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Semarang tidak berjalan dengan baik. Keluhan yang disampaikan oleh pengelola pasar terkait implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan tidak segera mendapatkan tindakan. Selain itu, DPRD menetapkan target retribusi tidak berdasarkan pada potensi yang ada sehingga sulit untuk direalisasikan.

Kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang juga mengalami permasalahan pada pembayaran retribusi bagi pedagang. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan BAB 2, Pasal 26d dinyatakan bahwa setiap pedagang wajib membayar retribusi. Retribusi pelayanan pasar merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan sarana dan prasarana yang terdapat di pasar. Retribusi pelayanan pasar diambil dari los, kios, dan pelataran atau Pedagang Kaki Lima (PKL).

Retribusi merupakan bagian dari sumber PAD yang dapat direncanakan dan perlu direalisasikan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi daerah adalah sektor yang memiliki peranan dan fungsi untuk meningkatkan PAD untuk daerah kabupaten dan kota. Namun, realisasi penerimaan pendapatan retribusi pelayanan pada Pasar Babadan belum tercapai sepenuhnya.

Tabel 1. 3 Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Babadan Tahun 2020 – 2022

Tahun	Lokasi	Target(Rupiah)	Realisasi(Rupiah)	Persentase
2020	Pelataran atau PKL	811.498.000	654.850.000	80,70%
	Los			
	Kios			
2021	Pelataran atau PKL	67.042.400	43.226.000	64%
	Los	590.544.000	449.820.600	76%
	Kios	689.108.800	551.192.800	80%
	Jumlah	1.346.695.200	1.044.239.400	73,3%
2022	Pelataran atau PKL	67.042.400	52.755.000	79%
	Los	590.544.000	470.112.000	80%
	Kios	689.108.800	553.582.100	80%
	Jumlah	1.346.695.200	1.076.449.100	79,67%

Sumber: Telah diolah kembali oleh peneliti 2023, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pendapatan retribusi pelayanan Pasar Babadan tahun 2020 – 2022 cenderung fluktuatif dan tidak mencapai target sehingga tidak mampu memberikan kontribusi yang baik bagi PAD Kabupaten Semarang. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2020 hanya mampu merealisasikan sebesar sebesar 80,7%. Persentase tersebut mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 73,3% dengan pelataran atau PKL sebesar 64%, los sebesar 76%, dan kios sebesar 80%. Meskipun pada tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, tetapi masih jauh dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 79,67% dengan pelataran atau PKL sebesar 79%, los sebesar 80%, dan kios sebesar 80%. Realisasi penerimaan pendapatan retribusi pelayanan Pasar Rakyat Babadan yang belum memenuhi target ini menandakan bahwa implementasi kebijakan tidak berjalan dengan optimal karena pedagang belum menerima kebijakan sebagai aturan yang harus dilaksanakan.

Realisasi penerimaan pendapatan retribusi pelayanan Pasar Rakyat Babadan yang belum memenuhi target menandakan implementasi kebijakan tidak berjalan dengan optimal karena pengelola pasar sebagai pelaksana tidak tegas dalam menjalankan perannya untuk menarik retribusi dari pedagang. Hal ini disampaikan oleh koordinator pengelola Pasar Rakyat Babadan dalam wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut:

“Sebenarnya ada denda, tapi memperberat juga. Kadang dikasih tetapi kadang ya tidak mau bayar. Kalau dia tidak jualan 90 hari harus dikembalikan ke pemerintah sebenarnya, tetapi istilahnya peraturan itu tidak berjalan.” (Wawancara pada hari Rabu 24 Mei 2023)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pengelola pasar tidak menjalankan kebijakan yang sudah ditetapkan. Peraturan yang telah ditetapkan tidak ditegakkan dengan sebagaimana mestinya. Pengelola pasar tidak memberikan sanksi berupa denda bagi pedagang yang telat membayar retribusi. Pedagang yang tidak melakukan proses jual beli lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan pun tidak dicabut izin dagangnya. Hal ini menandakan bahwa pengelola pasar sebagai pelaksana tidak tegas dalam menjalankan perannya sehingga pedagang tidak jera untuk melakukan pelanggaran.

Dalam implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang, pedagang merasa keberatan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh koordinator pengelola Pasar Rakyat Babadan dalam wawancara yang telah peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

“Banyak pedagang yang keberatan dengan kebijakan yang ada dan beberapa juga masih melanggar peraturan.” (Wawancara pada hari Rabu 24 Mei 2023)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pedagang merasa keberatan dengan kebijakan pembinaan sehingga terdapat pedagang yang melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang tidak memberikan respon yang baik untuk dibina.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti melakukan penelitian pada Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang guna menjawab pertanyaan penelitian mengapa pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang belum berjalan dengan optimal.

1.2.Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang?

1.3.Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
2. Untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang

1.4.Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik terkait pemikiran akademis dalam implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengalaman untuk melakukan penelitian.dengan menggunakan materi yang diajarkan dalam perkuliahan.

2. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini mampu mengupayakan peningkatan implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang dengan berkontribusi memberikan saran serta masukan positif.

1.5.Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai analisis implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang tidak terlepas dari pengkajian penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membantu peneliti untuk mengetahui perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi kebijakan pembinaan pasar. Berikut ini merupakan tabel penelitian terdahulu.

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
1.	Putri, Tanti Anggita dan Rengga, Aloysiu, 2019	Melakukan analisis implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2014 tentang Izin Penggunaan Kios dan Los di Pasar Batang di Kabupaten Batang serta untuk mengetahui faktor-faktor yang penghambat dan pendorongnya	Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho yang menyatakan bahwa keefektifan implementasi kebijakan dapat dilihat dari ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan, dan ketepatan proses. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III	Deskriptif kualitatif	Implementasi Bupati Peraturan Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Izin Penggunaan Kios dan Los di Pasar Batang masih menghadapi kendala terutama terlihat dari para pedagang yang melanggar aturan seperti memindahtangankan atau menghentikan kios atau los kepada orang lain tanpa sepengetahuannya mulai dari kepala pasar, kios terbengkalai, dan kekurangan kesadaran masyarakat pedagang tentang kebersihan pasar.

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
			terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi , yaitu komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi.		
2.	Nawang Sari dkk, 2023	Melakukan analisis implementasi kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Riant Nugroho yang mengemukakan bahwa terdapat 5 tepat yang harus dipenuhi berkaitan dengan keefektifan implementasi kebijakan yang terdiri dari ketepatan kebijakan, pelaksana, target, lingkungan, serta proses. Untuk mengetahui faktor yang	Deskriptif kualitatif	Implementasi kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Demak belum mencapai tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, dan tepat proses. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penggunaan plastik di dalam negeri berupa minuman kemasan, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, keterbatasan infrastruktur, kurangnya keterlibatan sektor swasta dalam pengurangan sampah, dan kurangnya partisipasi masyarakat.

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
			<p>mempengaruhi implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan teori Zainal Abidin (2019) yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan berkaitan dengan dua faktor utama yaitu faktor utama internal dan faktor utama eksternal.</p>		
3	Pratama, Erry & Hertati, Diana, 2021	Melakukan analisis implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional oleh pemerintah Kabupaten Mamuju Utara guna menemukan konsep baru tentang implementasi kebijakan pengelolaan pasar tradisional	Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Edwards III. Dalam pandangan Edwards III terdapat 4 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu komunikasi, sumber	Deskriptif kualitatif	Implementasi kebijakan pengelolaan Pasar Rakyat Buduran Kabupaten Sidoarjo belum berjalan dengan optimal. Terdapat beberapa indikator yang mengalami hambatan, yaitu, disposisi, komunikasi, struktur birokrasi, dan sumber daya.

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
			daya, diposisi dan struktur birokrasi.		
4	Ramadhani, Haji Mukti dkk, 2022	Melakukan deskripsi dan analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar (Kasus Pasar Induk Amuntai Study)	Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edwards III (dalam Agustino 2008). Dalam pandangan Edwards III terdapat empat variabel yang mempengaruhi implementasi , yaitu komunikasi, sumber daya, diposisi dan struktur birokrasi	Deskriptif kualitatif	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pasar Induk Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara belum berjalan dengan baik yang ditandai dengan sektor komunikasi dan sumber daya yang masih lemah.
5	Kaunang, Bian dkk, 2021	Melakukan analisis pelaksanaan kebijakan pemerintahan mengenai ketertiban umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon	Penelitian ini menggunakan teori George Edwards III yang mengemukakan 4 konsep yang mempengaruhi implementasi kebijakan	Deskriptif kualitatif	Implementasi kebijakan pemerintahan mengenai ketertiban umum di Pasar Tradisional Kota Tomohon masih belum dilakukan secara optimal. Implementasi kebijakan tersebut belum didukung

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
			yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.		dengan sumber daya, khususnya sumber daya finansial
6	Ong, Siew Chin dkk, 2022	Melakukan analisis hambatan pada implementasi dasar e-pharmacy dalam mempromosikan perkhidmatan farmikal dalam penerbangan online di Malaysia	Penelitian ini menggunakan teori serupa dari berbagai bidang penelitian kebijakan, seperti kebijakan lingkungan (Tuokuu et al., 2018), kebijakan kesehatan (Havers et al., 2019) dan kebijakan energi (Gauthier & Moran, 2018), diadopsi dimensi kebijakan berikut: fitur kebijakan, kompatibilitas kebijakan, pembatasan kebijakan dan lingkungan kebijakan	Deskriptif kualitatif	Hambatan dalam implementasi pada implementasi dasar e-pharmacy di Malaysia adalah kurangnya perhatian pembuat kebijakan terhadap kepentingan pribadi, fitur kebijakan yang tidak jelas, sikap negatif organisasi, sumber daya dan pendanaan yang terbatas dan persyaratan yang berlebihan sebagai hambatan untuk implementasi kebijakan e-farmasi

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
7	Bria, Yonivasius 2023	Melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan relokasi Pasar Tradisional Saumlaki	Penelitian ini menggunakan teori Kebijakan Publik oleh Suharno (2010). Menurut pandangan Suharno, kebijakan publik ditentukan oleh variabel-variabel, yaitu tujuan yang ingin dicapai, preferensi nilai, sumber daya, kemampuan aktor, lingkungan sosial ekonomi politik, dan strategi yang digunakan	Deskriptif kualitatif	Implementasi kebijakan relokasi Pasar Tradisional Saumlaki belum berjalan dengan optimal hal ini dapat dilihat dari beberapa pedagang yang tidak setuju untuk direlokasi karena lokasi Pasar Omele Sifnana jauh dari jantung Kota Saumlaki
8	De Oliveira, Breyner Ricardo & Daroit, Dorian, 2020	Melakukan analisis birokrat tingkat jalanan membangun dan mengaktifkan jaringan lintas sektoral yang disebabkan oleh implementasi Program <i>Bolsa Família</i> (BFP) di	Penelitian ini menggunakan teori jaringan aktor dengan indikator teknologi, rutinitas, birokrat tingkat jalan dan wilayah.	Deskriptif kualitatif	Birokrasi tingkat jalan muncul sebagai hubungan di tingkat lokal, menunjukkan jaringan perlindungan sosial di wilayah tersebut tergantung pada hubungan pribadi dan mediasi di antara agen, lembaga, dan peralatan publik yang terwujud oleh proses yang

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
		wilayah kemiskinan ekstrem di Brasil			berasal dari pemantauan kehadiran di sekolah. Artikulasi dan interaksi antara sekolah dan agen sosial mencerminkan tingkat kerjasama lintas sektoral, ditandai dengan pola pemahaman atau terjemahan rutinitas dan strategi yang berbeda. Analisis ini secara eksplisit menyoroti hubungan antara elemen material dari jaringan yang diinduksi oleh BFP, menekankan potensi mereka untuk memahami implementasi kebijakan sosial dan pendidikan.
9	Silva, Natalia Pereira & de Oliveira, Julicristie Machado, 2023	Melakukan analisis implementasi NutriSUS di kotamadya Porto Ferreira, SP, dan memahami disonansi antara anggapan teoritis dan praktisnya	Penelitian ini menggunakan teori Minayo (2014) untuk menganalisis data dengan menggunakan langkah pra-analisis, eksplorasi bahan dan perlakuan terhadap hasil	Deskriptif kualitatif	Implemetasi NutriSUS di Kotamadya Porto Ferreira, SP belum berjalan dengan optimal hal ini ditandai dengan intersektoralitas yang tidak terkonsolidasi; kurangnya pelatihan staf yang memadai; pencatatan data cakupan yang tidak

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
			yang diperoleh dan interpretasi.		akurat; hambatan birokrasi dan administrasi terkait dengan perolehan input dan distribusi; kurangnya informasi yang ditujukan kepada orang tua dan / atau wali
10	Sokseleuy, Yue 2020	Melakukan analisis implementasi kebijakan perikanan yang terkait dengan pengelolaan pemerintah daerah Kamboja	Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Van Meter & Van Horn (1975); Sabatier dan Mazmanian; dan George C. Edwards III (1980). Berbagai teori tersebut diadopsi menjadi tiga kelompok faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan, yaitu: (1) Faktor kebijakan: jenis kebijakan, manfaat kebijakan, lokasi	Deskriptif kualitatif	Implementasi kebijakan perikanan terkait pengelolaan pemerintah daerah Kamboja belum berjalan dengan optimal. Pemerintah Kamboja perlu memperhatikan insentif bagi pengusaha lokal. Sebagai pengelola, pemerintah kabupaten memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi yang didelegasikan kepadanya dari pemerintah provinsi. Begitu juga dengan bupati yang memiliki banyak tugas, maka perlu dilimpahkan sebagian wewenangnya kepada pejabat di bawahnya.

NO	PENELITI/TAHUN	TUJUAN PENELITIAN	LANDASAN TEORI	METODE	HASIL PENELITIAN
			<p>pengambil keputusan, ruang lingkup tujuan kebijakan, legitimasi pembuat kebijakan, persepsi kebijakan, (2) Faktor organisasi: jenis organisasi, ukuran organisasi, saling ketergantungan, struktur implementasi, sumber daya, budaya organisasi, (3) faktor lingkungan: kondisi sosial, ekonomi dan budaya, kondisi demografis.</p>		

Sumber: Peneliti

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah diulas oleh peneliti, belum ditemukan pembahasan spesifik mengenai indikator yang perlu dipenuhi untuk mencapai implementasi kebijakan pembinaan pasar rakyat yang efektif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan menggunakan teori implementasi menurut Nugroho (2021).

Penelitian terdahulu memiliki fokus yang sama, yaitu untuk menganalisis implementasi kebijakan publik. Penelitian terdahulu dengan topik implementasi kebijakan pembinaan di pasar tradisional memberikan gambaran informan yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu pedagang, masyarakat, pengelola pasar, dan instansi pemerintah yang terlibat. Berdasarkan hasil rujukan melalui penelitian terdahulu, maka peneliti akan melakukan analisis implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang dari segi teori yang harus dipenuhi dalam implementasi kebijakan menurut Nugroho (2021) dan teori faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan menurut George Edwards III (dalam Syahrudin, 2018).

1.5.2. Administrasi Publik

Administrasi menurut Nur dkk (2022) merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan kerja sama dari beberapa aktor untuk mencapai tujuan

yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Rodyah dkk (2021) menjelaskan bahwa publik berkaitan erat dengan kepentingan bersama. Ada tiga unsur yang ada dalam pengertian publik, yaitu adanya beberapa pelaksana, kepentingan bersama, dan perasaan yang sama. Hendrayady dkk (2022) mengemukakan bahwa administrasi publik adalah ilmu sosial yang membahas mengenai kehidupan bernegara melalui tiga elemen penting, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Administrasi publik juga memiliki keterkaitan dengan manajemen publik, kebijakan publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika penyelenggara negara.

Adapun pendapat lain dari Malawat (2022) bahwa administrasi memiliki fungsi untuk memenuhi kepentingan manusia sebagai makhluk sosial. Sedangkan, publik dapat disebut juga sebagai masyarakat, orang banyak, dan negara.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari pengelolaan organisasi publik untuk memenuhi kebutuhan publik.

1.5.3. Paradigma Administrasi Publik

Menurut Keban (2019) pergeseran paradigma terjadi pada ilmu administrasi publik. Adapun paradigma-paradigma tersebut, sebagai berikut:

1. Paradigma pertama administrasi publik, atau paradigma dikotomi politik administrasi pada abad ke-19 (1900-1926). Paradigma ini memiliki tokoh Lenand D. White dan Frank J. Goodnow yang menyatakan bahwa birokrasi

pemerintahan menjadi pusat dalam administrasi negara. Namun, paradigma ini menimbulkan kontra di kalangan praktisi dan akademisi terkait dikotomi politik-administrasi. Adanya ulasan dari Leonald White mengenai keberjalanan politik seharusnya tidak mengganggu keberjalanan administrasi dan membawa administrasi negara mendapatkan legitimasi akademis.

2. Paradigma kedua yang muncul pada tahun 1927-1937. Paradigma ini memiliki tokoh Max Weber, Henry Fayol, Frederick W. Taylor, dan Mary Parker Follet. Tokoh-tokoh tersebut fokus kepada pengaruh manajemen terhadap administrasi negara. Luther H. Gulick dan Lyndall Urwick membahas mengenai rangkaian tanggung jawab eksekutif. Paradigma pertama dan kedua merupakan teori klasik administrasi publik atau Old Public Administration, yang memiliki tugas kunci pemerintahan sebagai penyampai pelayanan, yaitu pembangunan untuk rumah, politisi, kesejahteraan, dan sekolah. Kritik dari teori klasik administrasi publik adalah penyelenggaraan administrasi publik menjadi tidak efisien karena pembiayaan berasal dari pungutan pajak.
3. Paradigma ketiga dikenal sebagai teori neoklasik yang muncul pada tahun 1950-1970. Paradigma ini berusaha mengembalikan hubungan antara ilmu politik dengan administrasi negara. Paradigma ketiga menjelaskan bahwa administrasi negara sebagai ilmu politik. Paradigma ini beranggapan bahwa administrasi publik sebagai ilmu politik dengan lokus birokrasi

pemerintahan pada akhirnya mengalami krisis identitas. Hal ini disebabkan oleh ilmu politik mendominasi disiplin ilmu pada administrasi publik.

4. Paradigma keempat muncul pada tahun 1956-1970. Paradigma keempat ini beranggapan bahwa administrasi negara sebagai ilmu administrasi. Administrasi negara terbagi menjadi dua, yaitu ilmu administrasi yang membahas mengenai kebijakan publik dan ilmu administrasi murni dengan berpedoman pada psikologi sosial. Tokoh dalam paradigma ini, yaitu Keith M. Henderson beranggapan bahwa seharusnya administrasi negara fokus kepada teori organisasi sehingga muncul spesialisasi ilmu administrasi atau biasa disebut dengan *Organizational Development (OD)*.
5. Paradigma kelima dimulai pada tahun 1970. Paradigma ini beranggapan bahwa administrasi negara adalah administrasi negara. Pada paradigma kelima, perkembangan administrasi negara tidak fokus kepada lokus administrasi negara sebagai ilmu murni saja, tetapi administrasi negara juga memperhatikan bagaimana pengembangan teori organisasi. Langkah yang diambil adalah dengan memperhatikan bagaimana cara kerja, perilaku individu, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Paradigma ini mengembangkan ilmu kebijaksanaan, proses kebijakan pemerintah, langkah pengukuran kebijakan, dan ekonomi politik.
6. Paradigma keenam menjadi pembaharuan dalam penyelenggaraan administrasi publik. Paradigma keenam menghasilkan konsep baru yang biasa disebut dengan istilah *New Public Management (NPM)*. Konsep NPM memiliki tujuan utama untuk mentransformasikan kinerja yang semula

digunakan dalam sektor privat ke sektor publik. NPM muncul karena krisis kesejahteraan di beberapa negara dan didukung oleh promosi dari beberapa organisasi, seperti Bank Dunia dan IMF. Pada paradigma keenam, administrasi sebagai *governance* menjadi semakin kuat dalam menjelaskan berbagai permasalahan kontemporer. Pada paradigma keenam, administrasi publik telah mencakup seluruh organisasi dalam rangkaian penyusunan *public policy*. Selain itu, lembaga non pemerintah juga terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Ilmu administrasi sebagai *governance* memposisikan proses kebijakan sebagai fokus utama yang memiliki fungsi untuk menganalisis dan mengkaji kekuasaan politik, administratif, dan ekonomi dalam rangka mengatasi masalah publik.

Berdasarkan uraian keenam paradigma administrasi publik, penelitian ini fokus pada paradigma *governance* karena kebijakan pembinaan pasar yang bertujuan untuk memberikan pelayanan publik yang efektif serta efisien kepada masyarakat dan mementingkan kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik. Paradigma ini juga membahas mengenai perkembangan pemerintah ke arah pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan istilah *good governance* dengan cara memberikan pelayanan publik yang baik. Pelayanan publik yang baik dapat diberikan oleh pemerintah dengan mengoptimalkan implementasi kebijakan pembinaan pasar untuk mencapai tujuan pelayanan yaitu kepuasan masyarakat.

1.5.4. Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah salah satu dimensi dalam ilmu administrasi publik. Menurut pandangan Pramono (2020) kebijakan publik berkaitan dengan keputusan yang ditetapkan oleh suatu lembaga pemerintah dan dianggap sebagai pedoman bagi setiap usaha dan aparatur pemerintah. Kebijakan publik perlu dijadikan pedoman agar implementasi tujuan kebijakan dapat berjalan dengan konsisten dan lancar sesuai dengan kenyataan. Kebijakan publik menurut Mulyadi (2018) adalah suatu proses berkesinambungan yang terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang berkaitan satu sama lain dan dilakukan oleh pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan lain dalam mengelola, mengatur, serta memecahkan masalah publik, urusan publik, dan sumber daya demi kepentingan bersama. Dewi (2022) mengidentifikasi bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan secara sengaja yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran secara konsisten, bukan hanya dilakukan secara acak dan menyimpang.

Pendapat lain terkait kebijakan publik dikemukakan oleh Anggara (2018) sebagai suatu keputusan yang ditetapkan oleh pemegang otoritas publik yang bertujuan untuk mengikat atau memberikan pedoman bagi banyak orang. Pemegang otoritas publik yang memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan tersebut ialah mereka yang memiliki mandat dari masyarakat, seperti dari hasil pemilihan umum.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bersama dengan pemangku kepentingan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

1.5.5. Implementasi Kebijakan

Mulyadi (2018) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dari perspektif administrasi publik merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilaksanakan oleh lembaga atau beberapa orang dalam rangka mengimplementasikan tugas pemerintahan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat secara efektif, efisien, dan rasional. Sedangkan, implementasi kebijakan menurut van Meter van Horn (dalam Subianto, 2020) berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok privat ataupun publik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam keputusan kebijakan.

Menurut Dewi (2022) tujuan kebijakan dalam pelaksanaan dengan hasil kegiatan akan terhubung dan masalah publik dapat teratasi jika implementasi kebijakan berjalan sebagaimana mestinya. Adapun pendapat lain mengenai implementasi kebijakan dari Satsipi dan Mufidayati (2019) bahwa implementasi kebijakan fokus kepada tahap yang perlu dilakukan agar tujuan suatu kebijakan dapat tercapai.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses kebijakan yang dilaksanakan melalui kerja sama dari sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan atau

sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Nugroho (2021) mengemukakan bahwa terdapat lima “tepat” yang perlu dipenuhi untuk mencapai implementasi kebijakan yang efektif sebagai berikut:

1. Tepat kebijakan

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat permasalahan yang perlu diselesaikan. Tepat kebijakan berkaitan dengan sejauh mana pemecahan masalah dalam pelaksanaan kebijakan. Apakah kebijakan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dan telah dirumuskan sesuai dengan karakter permasalahan.

2. Tepat pelaksana

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan terdapat lembaga-lembaga yang berperan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Adapun lembaga yang dapat berperan menjadi implementor dalam pelaksanaan kebijakan publik, antara lain pemerintah, kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, atau pelaksanaan kebijakan yang memiliki sifat monopoli.

3. Tepat target

Tepat target dalam pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan apakah target yang diintervensi dalam kebijakan sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, tepat target juga berkaitan dengan apakah kebijakan yang ditetapkan bertentangan atau tumpang tindih dengan intervensi dari kebijakan-kebijakan lainnya. Tepat target juga membahas mengenai kondisi dari target dalam kebijakan apakah ada pada kondisi yang siap untuk diintervensi sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

4. Tepat lingkungan

Dalam pelaksanaan kebijakan terdapat dua lingkungan yang perlu diamati, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Tepat lingkungan berkaitan dengan bagaimana interaksi antara perumus dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lainnya yang turut terlibat dalam menyukseskan pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan, lingkungan eksternal erat kaitannya dengan bagaimana publik memandang kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Tepat proses

Dalam pelaksanaan kebijakan, tepat proses dapat dibagi dalam ketiga proses sebagai berikut:

1. *Policy Acceptance*, berkaitan dengan pemahaman publik dan pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Publik perlu memahami kebijakan layaknya pedoman atau aturan. Begitu juga dengan pemerintah yang perlu memahami kebijakan sehingga pemerintah dapat memahami tugas yang harus dilaksanakan.
2. *Policy adoption*, berkaitan dengan penerimaan publik dan pemerintah terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Publik perlu menerima kebijakan sebagai pedoman atau aturan. Begitu juga dengan pemerintah yang perlu menerima kebijakan yang telah ditetapkan sebagai tugas yang harus dilaksanakan.
3. *Strategic Readiness*, berkaitan dengan kesiapan publik dan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan.

Publik perlu siap untuk melaksanakan dan menjadi bagian dari keberjalanan kebijakan. Begitu juga dengan pemerintah yang perlu siap untuk menjadi pelaksana dalam kebijakan.

5.1.1. Model Implementasi George Edwards III

Menurut pandangan George Edwards III (dalam Syahrudin, 2018) implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil jika mampu memenuhi beberapa variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel memiliki karakteristik dan daya ikat yang berbeda dengan hubungannya pada implementasi kebijakan. Namun, variabel-variabel tersebut memiliki daya tarik hubungan yang sama karena posisinya yang setara dalam implementasi kebijakan. Adapun faktor-faktor implementasi menurut George Edwards III (dalam Syahrudin, 2018) sebagai berikut:

1. Komunikasi

Dalam pelaksanaan kebijakan, kelompok sasaran harus mengetahui sasaran yang akan dicapai untuk mengurangi terjadinya distorsi dalam implementasi. Penolakan atau perlawanan dari kelompok sasaran dapat terjadi apabila tujuan suatu kebijakan tidak jelas, tidak konsisten, dan tidak ditransmisikan dengan baik. Permasalahan tersebut dapat teratasi apabila komunikasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan terlaksana dengan baik. Dengan demikian, setiap kebijakan harus dikomunikasikan dengan tepat.

2. Sumber Daya

Pelaksanaan suatu kebijakan membutuhkan sumber daya yang baik. Meskipun kebijakan telah ditetapkan dan dikomunikasikan dengan baik, tetapi tidak mendapatkan dukungan dari sumber daya maka pelaksanaan kebijakannya tetap tidak dapat berjalan dengan efektif. Dalam pelaksanaan suatu kebijakan dibutuhkan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.

3. Disposisi

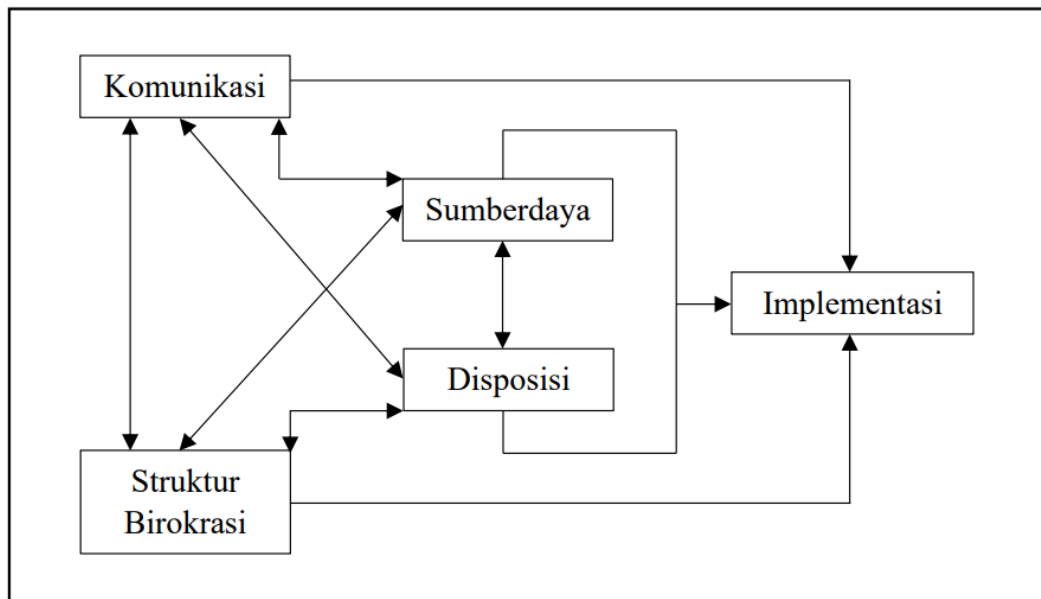
Disposisi berkaitan dengan karakteristik atau watak dari implementor kebijakan. Kejujuran, komitmen, dan sifat demokratis dari implementor akan menunjang pelaksanaan suatu kebijakan. Implementor yang memiliki disposisi baik dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, jika implementor memiliki pandangan atau sikap yang berbeda dengan kebijakan yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan kebijakan tidak dapat berjalan dengan efisien. Disposisi pelaksana yang buruk akan menimbulkan bias dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur atau tatanan organisasi memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur operasi yang standar atau *Standard Operating Procedures* (SOP) merupakan aspek struktur yang penting dalam setiap organisasi. Pelaksanaan suatu kebijakan membutuhkan SOP untuk dijadikan sebagai pedoman oleh implementor atau pelaksana dalam

menjalankan tugasnya. Prosedur yang terlalu rumit akan mempersulit pelaksanaan suatu kebijakan karena aktivitas tidak dapat dilakukan dengan fleksibel.

Gambar 1. 1 Faktor Implementasi Menurut Edwards III



Sumber: Syahrudin, 2018

5.1.2. Pembinaan Pasar Rakyat

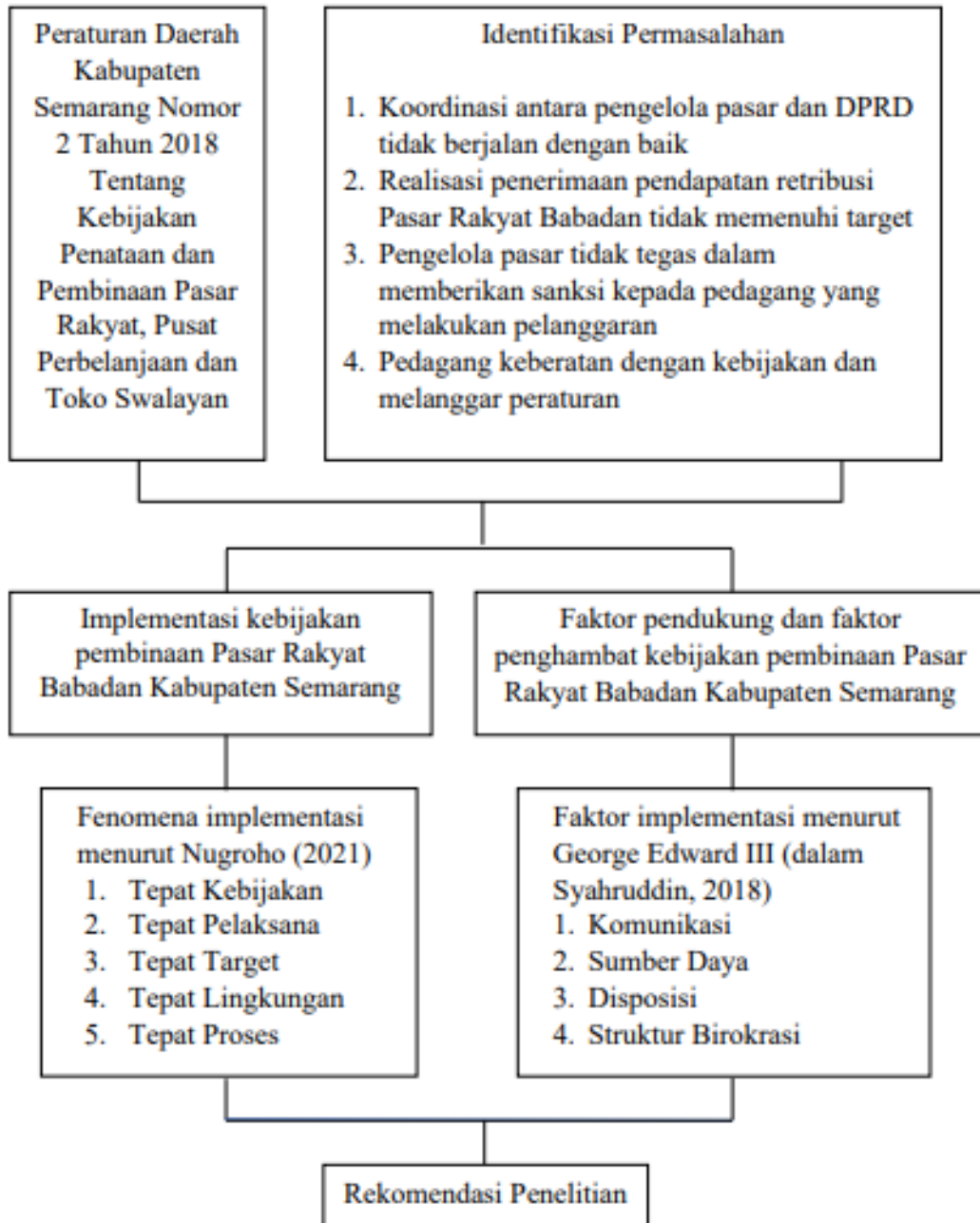
Thoha (dalam Septiyuslianisa, 2020) mengemukakan bahwa pembinaan merupakan langkah, proses, hasil ataupun pernyataan untuk menjadi lebih baik. Dalam pengertian ini terdapat dua unsur, yaitu pembinaan sebagai suatu tindakan dan pembinaan untuk memperbaiki sesuatu. Pembinaan yang baik memerlukan kolaborasi yang ditetapkan dan dipraktikkan melalui serangkaian perencanaan, pengarahannya, pengendalian, dan pengawasan.

Pembinaan pasar rakyat Kabupaten Semarang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Dalam peraturan daerah tersebut, pembinaan pasar rakyat merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui pembinaan manajemen yang baik dalam bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap pasar rakyat. Pasar rakyat sendiri merupakan pasar yang dikelola dan didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, serta Swasta. Pasar rakyat merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dijalin dengan swasta dan berbagai tempat usaha yang dapat berupa los, kios, tenda, dan toko. Pasar rakyat dapat dimiliki dan dikelola oleh pedagang kecil, menengah, koperasi, ataupun swadaya masyarakat. Proses jual beli di pasar rakyat dilakukan dengan tawar menawar antara pedagang dengan pembeli.

5.2.Kerangka Berpikir

Penelitian analisis implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang tidak terlepas dari kerangka berpikir sebagai dasar penelitian yang merupakan perpaduan dari kebijakan, identifikasi permasalahan, kajian kepustakaan, dan teori dalam penelitian. Berikut merupakan kerangka berpikir dari penelitian ini:

Gambar 1. 2 Kerangka Berpikir



Sumber: Analisis Peneliti

5.3.Operasionalisasi Konsep

Analisis implementasi kebijakan pembinaan pasar rakyat merupakan proses pelaksanaan kebijakan pembinaan melalui pengawasan dan pengendalian terhadap pasar rakyat. Fenomena implementasi kebijakan pembinaan pasar rakyat meliputi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat proses, tepat lingkungan, dan tepat target. Adapun penjelasan fenomena-fenomena tersebut sebagai berikut:

- a. Tepat Kebijakan, merupakan proses pencapaian tujuan dari kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
- b. Tepat Pelaksana, merupakan keterlibatan aktor yang berperan dalam kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
- c. Tepat Proses, merupakan kesiapan pelaksana dan target terhadap kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang.
- d. Tepat Lingkungan, terbagi menjadi lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal yaitu interaksi antara pelaksana dengan perumus kebijakan dan lembaga lain yang terlibat. Lingkungan eksternal yaitu persepsi pedagang dan masyarakat kebijakan terkait kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
- e. Tepat Target, berkaitan dengan kebijakan bertentangan atau tidak dengan kebijakan lain dan respon target terhadap kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang

Analisis implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang dipengaruhi oleh faktor penghambat dan faktor pendukung melalui fenomena komunikasi, sumberdaya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Adapun penjelasan fenomena-fenomena tersebut sebagai berikut:

- a. Komunikasi, terbagi menjadi kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang. Kejelasan berkaitan dengan informasi kebijakan yang jelas dan tidak ambigu. Konsistensi berkaitan dengan informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten sehingga tidak menimbulkan kebingungan.
- b. Sumber Daya, merupakan kecukupan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan untuk mendukung kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
- c. Disposisi Pelaksana, merupakan sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
- d. Struktur Birokrasi, merupakan kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang

Tabel 1. 5 Operasionalisasi Konsep

Tujuan Penelitian	Fenomena	Sub Fenomena
Analisis implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang	Tepat Kebijakan	Proses pencapaian tujuan dari kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
	Tepat Pelaksana	Keterlibatan aktor yang berperan dalam kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
	Tepat Proses	1. Kesiapan pelaksana terkait kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang 2. Kesiapan target terkait kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
	Tepat Lingkungan	1. Lingkungan internal, interaksi antara pelaksana dengan perumus kebijakan dan lembaga lain yang terlibat 2. Lingkungan eksternal, persepsi pedagang terkait kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
	Tepat Target	Kebijakan bertentangan atau tidak dengan kebijakan lain dan respon target terhadap kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
Faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang	Komunikasi	1. Kejelasan informasi terkait kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang 2. Konsistensi informasi terkait kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
	Sumberdaya	1. Kecukupan sumber daya manusia dalam kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang 2. Kecukupan sumber daya keuangan dalam kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
	Disposisi Pelaksana	Sikap pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang
	Struktur Birokrasi	Kejelasan prosedur pelaksanaan kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang

Sumber: Analisis Peneliti

5.4. Argumen Penelitian

Pasar rakyat merupakan sektor informal yang mampu menyerap banyak tenaga kerja melalui pedagang yang berjualan di pasar dan memiliki kontribusi penting dalam penerimaan PAD. Namun, keberadaan pasar rakyat saat ini terancam dengan pertumbuhan pasar dan toko modern yang berkembang sangat pesat. Peneliti juga menemukan permasalahan pada pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang. Koordinasi antara pengelola pasar dan DPRD yang tidak berjalan dengan baik. Realisasi penerimaan pendapatan retribusi Pasar Rakyat Babadan pun tidak memenuhi target. Pengelola pasar masih belum tegas dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang. Pedagang pun keberatan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Bahkan, terdapat beberapa pedagang yang melanggar peraturan.

Berbagai fenomena tersebut menarik perhatian peneliti untuk menganalisis implementasi dari kebijakan pembinaan di Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Peneliti menggunakan teori implementasi dari Riant Nugroho dalam melihat proses implementasi kebijakan. Peneliti juga menggunakan teori dari George Edwards III untuk menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan. Dengan demikian, hasil temuan dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi dan acuan untuk pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang.

5.5. Metode Penelitian

5.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut Murdiyanto (2020) penelitian kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada pemahaman terkait permasalahan dengan berpedoman pada kondisi yang sebenarnya secara rinci, kompleks, dan holistik. Adapun tipe penelitian berdasarkan tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut:

- a. Penelitian eksploratif, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gejala yang relatif baru atau meneliti suatu gejala yang sampai saat ini belum pernah dirasakan atau diketahui. Penelitian eksploratif memiliki tujuan untuk mengembangkan gagasan dasar yang berkaitan dengan topik baru dan memberikan pedoman untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Dengan demikian, suatu permasalahan yang ditemukan di lapangan dapat dirumuskan secara detail dan rinci melalui penelitian eksploratif.
- b. Penelitian deskriptif, penelitian ini menggambarkan atau memberikan penjelasan rinci terkait suatu gejala ataupun fenomena. Hasil penelitian deskriptif biasanya berbentuk pola-pola atau tipologi terkait fenomena dalam penelitian. Tipe penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambarkan bagaimana mekanisme untuk menciptakan sekelompok pola atau kategori. Pada penelitian ini terdapat beberapa kegiatan yang harus dilakukan seperti menganalisa, mencatat, menginterpretasikan, dan mendeskripsikan kondisi yang sedang terjadi.

c. Penelitian eksplanatori, penelitian ini dilakukan untuk memberikan penjelasan mengenai alasan terjadinya suatu gejala. Hasil penelitian eksplanatori merupakan gambaran tentang hubungan sebab akibat. Tipe penelitian ini memiliki tujuan untuk menghubungkan beberapa pola yang berbeda, tetapi saling terkait dan memiliki hubungan sebab akibat. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggambarkan bagaimana implementasi pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang.

5.5.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah tempat atau wilayah yang digunakan untuk melaksanakan suatu penelitian. Pada penelitian ini, lokus yang dipilih oleh peneliti adalah Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang.

5.5.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau sering juga disebut dengan narasumber merupakan pihak yang terlibat dalam penelitian untuk dijadikan sebagai sampel. Subjek dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan. Dalam penelitian ini, subjek peneliti adalah individu atau kelompok yang memiliki informasi akurat yang dapat ditelusuri kembali ke fakta-fakta di lapangan.

Subjek penelitian ini dipilih secara *purposive*. Menurut Abdussamad (2021) teknik *purposive* adalah teknik penelitian dalam pengambilan

sampel sumber data yang dilakukan dengan pertimbangan dari informan atau orang yang memahami topik penelitian. Teknik *purposive* digunakan oleh peneliti dalam pengambilan sampel secara sengaja. Informan dalam penelitian ini adalah, Kepala Bidang Pasar dan PKL Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag) Kabupaten Semarang, Koordinator Pengelola Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang, pedagang pasar, dan masyarakat pengunjung Pasar Rakyat Babadan.

5.5.4. Jenis Data

Menurut Hardani (2020) data merupakan keterangan yang memberikan gambaran mengenai hasil pengamatan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang menunjukkan kualitas melalui bentuk angka non parametrik atau disajikan dalam bentuk kata bukan berupa angka. Data kualitatif juga dapat diartikan sebagai data yang berupa rangkaian kata, frasa, atau pernyataan yang mampu menggambarkan fenomena atau situasi yang ditemui dalam pelaksanaan penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan dokumen resmi di Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang.

5.5.5. Sumber Data

Menurut Hardani (2020) sumber data adalah suatu informasi yang memiliki fungsi untuk dijadikan sebagai bahan analisis dan menarik kesimpulan dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

- a. Data Primer, merupakan data penelitian yang didapatkan secara langsung dari informan atau narasumber melalui dokumentasi dan wawancara secara langsung di lapangan dengan narasumber yang memiliki informasi mengenai implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang.
- b. Data Sekunder, merupakan data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang erat kaitannya dengan topik implementasi kebijakan pembinaan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang.

5.5.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu :

- a. Wawancara, peneliti menyusun pertanyaan secara urut dan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara terstruktur, sehingga dalam pengumpulan data terlihat lebih rapi, dan lengkap, sehingga peneliti lebih mudah dalam mencari dan mengolah data.
- b. Dokumentasi, penelitian ini didukung oleh foto yang diambil oleh peneliti di Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang.

5.5.7. Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi studi pustaka dan transkrip wawancara secara langsung. Menurut Miles dan Huberman (dalam Rijali, 2019) terdapat beberapa alur kegiatan dalam suatu analisis yang terjadi secara bersama-sama sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, merupakan alur penelitian yang berkaitan dengan sumber, jenis, dan teknik penggalian data. Pada penelitian kualitatif, sumber data penelitian berupa kata dan tindakan yang disebut sebagai sumber data utama. Sumber data utama penelitian dapat dicatat oleh peneliti dalam tulisan, rekaman video, rekaman audio, atau pengambilan foto. Selain itu, sumber data juga dapat berupa dokumen, statistik, dan foto yang disebut sebagai sumber data tambahan. Sumber data tambahan didapatkan oleh peneliti dari arsip, dokumen, majalah, atau buku.
- b. Reduksi Data, merupakan kegiatan penelitian yang terdiri dari pemilihan, pengabstrakan, pemusatan perhatian, dan pemindahan data. Proses reduksi data terus berlangsung selama penelitian. Proses ini juga berkaitan dengan pembuatan rangkuman, pemilihan hal pokok, dan penentuan tema serta pola penelitian.
- c. Penyajian Data, merupakan kegiatan penelitian yang berkaitan dengan penyusunan informasi agar dapat menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. Penyajian data berupa teks catatan yang didapatkan dari lapangan, bagan, grafik, jaringan, dan bagan. Dari penyajian data tersebut, informasi dapat tersusun dengan padu sehingga peneliti dapat

mengetahui gejala yang terjadi dan menentukan kesimpulan yang tepat atau harus melakukan analisis ulang.

- d. Penarikan kesimpulan, didukung dengan bukti yang telah dikumpulkan dalam penelitian dapat ditentukan kesimpulan akhir dari penelitian.

5.5.8. Kualitas Data

Penelitian yang baik menandakan bahwa hasil penelitian mendapatkan kepercayaan karena bukti-bukti yang valid atau sesuai dengan keadaan di lapangan. Untuk mengetahui kualitas data penelitian diperlukan metode pengecekan data yang biasa disebut dengan triangulasi. Berikut merupakan jenis-jenis triangulasi menurut Sutopo (dalam Haryoko, 2020)

- a. Triangulasi sumber data, merupakan proses yang dilakukan untuk menguji kualitas atau kredibilitas data penelitian melalui pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber data.
- b. Triangulasi teori, merupakan proses yang dilakukan untuk menguji kualitas atau kredibilitas data dengan menggunakan teori-teori yang relevan untuk digabungkan dan menganalisis fokus penelitian.
- c. Triangulasi peneliti, triangulasi yang dilakukan dengan memanfaatkan beberapa peneliti karena setiap peneliti memiliki gaya, sikap, dan persepsinya masing-masing dalam mengamati dan menganalisis fenomena yang sama. Lebih dari satu orang peneliti melakukan observasi dan wawancara sehingga hasil pengamatan dari masing-masing peneliti dapat berbeda.

- d. Triangulasi metode, merupakan penggunaan metode ganda atau metode yang dilakukan dengan membandingkan data di lapangan melalui beberapa teknik pengumpulan data.
- e. Triangulasi waktu, merupakan penggunaan metode kredibilitas data mengenai perubahan suatu proses atau perubahan pada perilaku manusia. Perubahan tersebut menuntut peneliti untuk melakukan observasi yang dilakukan secara berulang kali. Peneliti perlu kembali ke lapangan di lain waktu untuk mendapatkan data yang kredibel.

Penelitian ini melakukan pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber data. Terkait dengan implementasi pembinaan dan penataan Pasar Rakyat Babadan Kabupaten Semarang, triangulasi sumber data dari dokumentasi dan hasil wawancara untuk memastikan kualitas data.